



Pemerintah
Kabupaten
Biak Numfor



RENCANA STRATEGIS (Renstra) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2019-2023





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karuniya Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2019-2023, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran - saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Biak, Januari 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Biak Numfor

Zacharias L Mailoa, ST, MM
Nip. 19670905 199712 1 001



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Daftar Tabel dan Gambar	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB 2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi.....	5
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	5
2.1.2. Struktur Organisasi.....	5
2.1.3. Uraian Tugas.....	8
2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional.....	12
2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia	13
2.2.2. Sumber Aset	14
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN Biak Numfor	15
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT.....	27
BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	29
3.1. IDENTIFIKSI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ...	29
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILI.....	31
3.1.1 Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang berwawasan lingkungan dan Tata Ruang.....	31
3.1.2 Tujuan dan Sasaran	33
3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L dan RESNTRA Kabupaten Biak Numfor.....	38
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KLHS	42
3.5. TELAAHAN ISU STRATEGIS.....	45
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN	46





4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47
4.2.. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang...	49
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	53
5.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	73
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	91
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	91
6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM ,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	92
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	102
7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
BAB 8. PENUTUP	105



Daftar Tabel dan Gambar

Gambar 1.1	Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	7
Gambar 5.2	Sistem Perwilayahaan Rencana Struktur kabupaten Biak Numfor	77
Tabel 2.1	Daftar Perincian Golongan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak numfor ..	13
Tabel 2.2	Jumlah PNS/CPNS menurut Pendidikan	
Tabel 2.3	Daftar asset Moda.....	14
Tabel 2.4	Pencapaian Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pelayanan perangkat Daerah.....	21
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Priritas dan Sasaran.....	29
Tabel 3.2	Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua, visi: “Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera... ..	39
Tabel 4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024... ..	52
Tabel 5.1	Keselarasan Misi dengan Strategi Kebijakan	55
Tabel 5.2	Pemetaan Waktu Arah Kebijakn.....	79
Tabel 6.1	Indikator Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas	
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	103
Tabel 7.2	Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	104



Pemerintah
Kabupaten
Biak Numfor





BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:

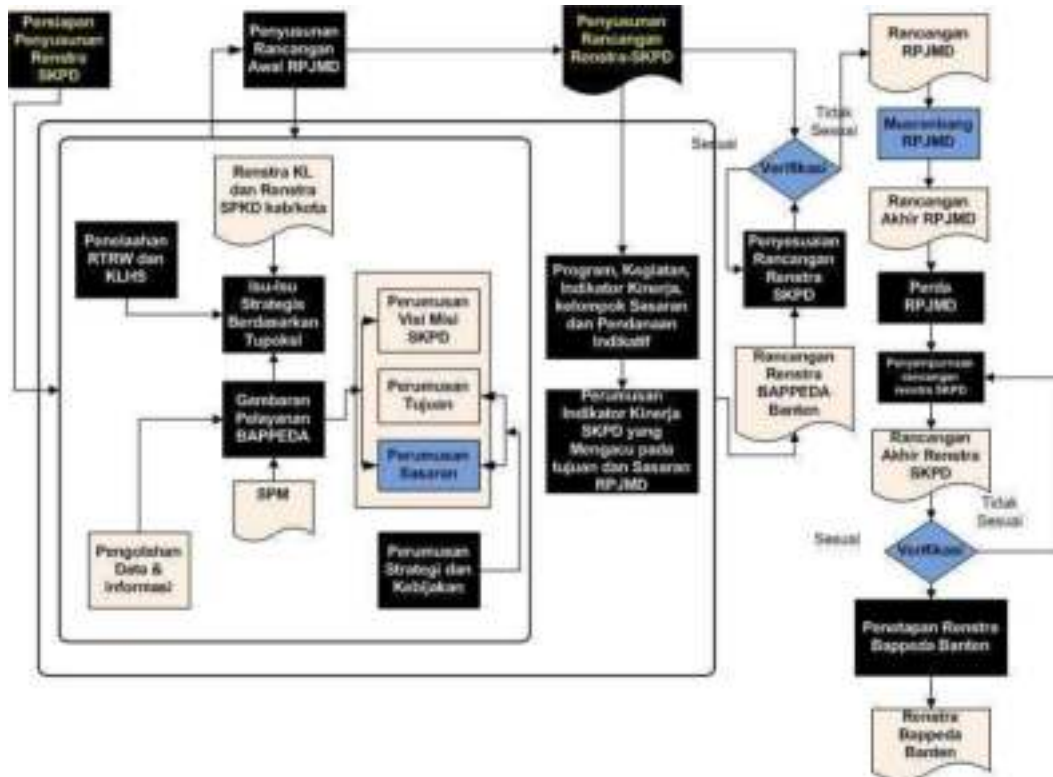
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi/Kabupaten Biak Numfor untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Biak Numfor dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA K/L Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 -2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Strategis selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Pembangunan melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Pembangunan;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Kepeuan.;

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Pembangunan melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan P e m b a n g u n a n ;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Biak Numfor disusun melalui sistematika sebagai berikut.



- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor** , menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Biak Numfor telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi/kabupaten/kota, serta penentuan isu-isu strategis Pembangunan
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor
- BAB VIII. Penutup**, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati Biak Numfor.

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakn teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyeleggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan ketatusahaan dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

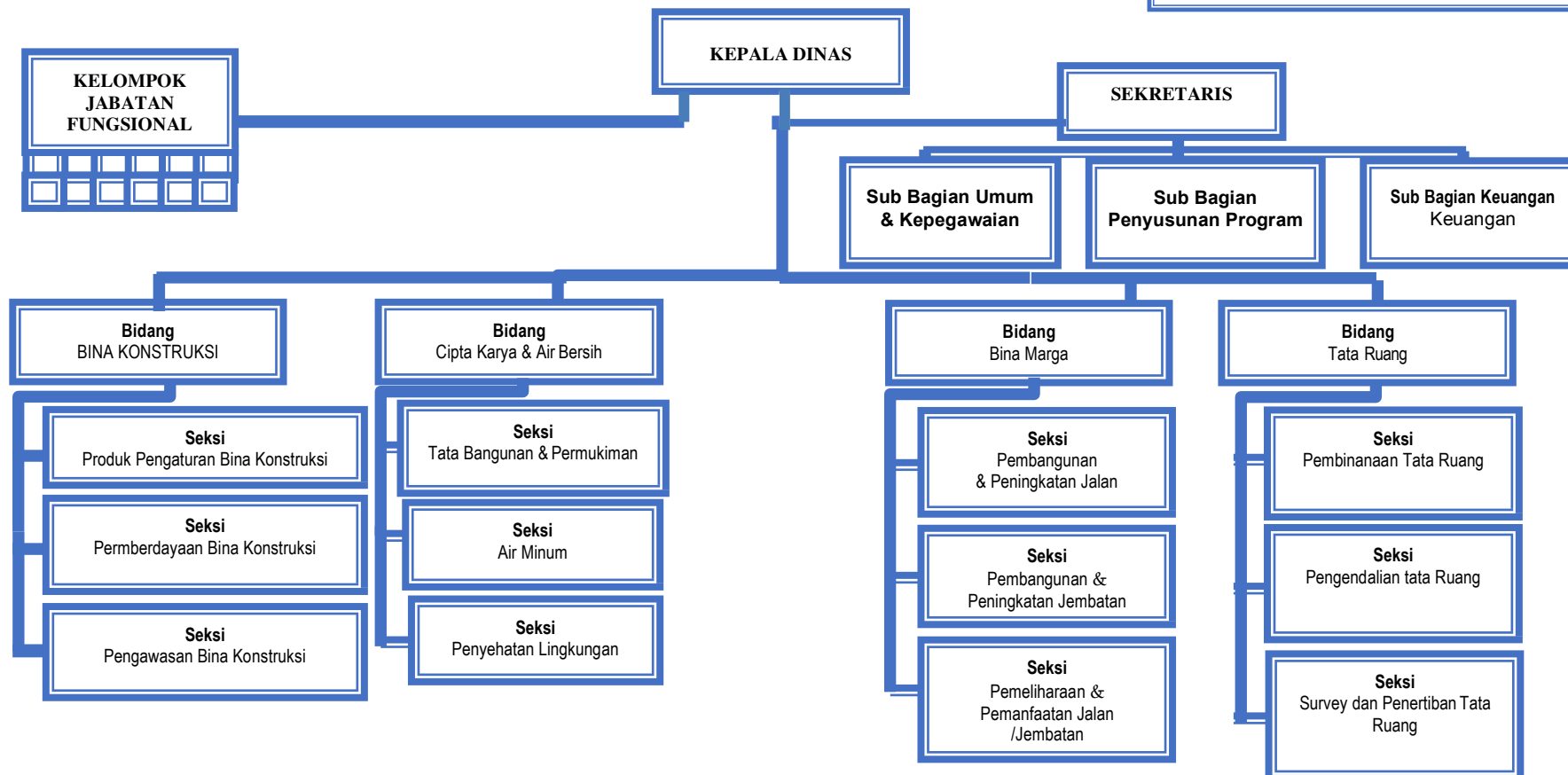
2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nunfor 13 Tahun 2017, struktur organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor meliputi; Kepala Dinas, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut



**Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BIAK NUMFOR
NOMOR : 13 TAHUN 2017





2.1.3. Uraian Tugas

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 tahun 2017 tentang “**Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor**” dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 117 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Fungsi Pokok DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor, dan sebagai lembaga teknis yang melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas tugas pembantuan dalam bidang urusan pekerjaan umum dengan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

➤ Susunan Organiasai DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Bina Konstruksi
- d. Kepala Bidang Cipta Karya dan Air Bersih
- e. Kepala Bidang Bina Marga
- f. Kepala Bidang Tata Ruang
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. 1. 1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu tugas – tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan mengedalikan tugas-tugas di bidang Umum dan kepegawaian , penyusunan Program dan Keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

➤ **Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris menyelenggarakan fungsi :**

- a. penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan program administrasi umum;
- c. pembinaan, pengkoordinasi, pengendali, pengawas program dan kegiatan Subagian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subagian.



- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat.

➤ **Rincian tugas dimaksud sebagai berikut:**

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan penyusunan program kerja dinas;
- b. Penatausahaan urusan umum;
- c. Penatausahaan kepegawaian;
- d. Pengelolaan inventaris dinas;
- e. Penyusunan program kerja;

➤ **Sekretariat terdiri dari :**

Subagian Umum dan Kepegawaian : mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, dan urusan rumah tangga

Sub Bagian Penyusunan Program : mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja

Sub Bagian Keuangan : mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, dan penyiapan bahan pelaksanaan keuangan, akuntansi, verifikasi, perlengkapan, pengelolaan asset serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

2. 1. 2. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan Produk pengaturan Bina Konstruksi, Pemberdayaan Bina Konstruksi dan Pengawasan Bina Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang bina konstruksi;
- b. Pemberian petunjuk teknis di bidang bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang bina konstruksi ;
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan di bidang bina konstruksi ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bina konstruksi;



- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. 1. 3. Bidang Bina Konstruksi terdiri dari :

Seksi Produk Pengaturan Bina Konstruksi : mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjamin mutu pelaksanaan dibidang pengaturan jasa konstruksi

Seksi Pmberdayaan Bina Konstruksi : mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi.

Seksi Pengawasan Bina Konstruksi : mempunyai tugas menyelenggarakan pemantauan, evaluasi jasa konstruksi dalam pembangunan pekerjaan umum.

2. 1. 4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Bangunan dan Permukiman , Air minum dan Penyeahatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakn dibidang tata bangunan, permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;
- b. Pemberian petunjuk teknis dibidang tata bangunan, pemukiman, air minum dan penyehatan lingkungan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sikronisasi penerapan kebijakan di bidang tata bangunan, pemukiman, air minum dan penyehatan lingkungan ;
- d. Pelaksanaa, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan di bidang tata bangunan, pemukiman, air minum dan penyehatan lingkungan .
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tata bangunan, pemukiman, air minum dan penyehatan lingkungan.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang tata bangunan, pemukiman, air minum dan penyehatan lingkungan



- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dians sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Cipta Karya terdiri dari :**

- a. Seksi Tata bangunan dan Permukiman : mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan tata bangunan dan permukiman;
- b. Seksi Air Minum : mempunyai tugas menyelenggarakan system penyediaan air minum
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan : mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air limbah dan drainase

2. 1. 5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan, peningkatan jalan , Pemabangunan dan peningkatan Jembatan serta Pemeliharaan dan Pemanfaatan jalan/ jembatan sesuai dengan ketentuan perundang -undang dan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan kabupaten dan jalan desa termasuk jembatan dan terwongan;
- b. Pemberian petunjuk teknis di bidang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, jembatan dan terowongan;
- c. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan di bidang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan jemabtan dan terowangan ;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan, peningkatan ,pemelihraan dan pemanfaatan jalan, jembatan dan terowongan;
- e. Penyusunan laporan dan pelaksanaan kebijakn dibidang pembangunan peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatn jalan, jembatan dan terowongan;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

➤ **Bidang Bina Marga terdiri dari ;**

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan : mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa termasuk terowongan;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan : mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan jembatan pada jalan kabupaten dan jalan desa;



- c. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan jalan/Jembatan : mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan rutin, berkala rehabilitasi jalan kabupaten dan jalan desa termasuk jembatan dan terowongan;

2. 1. 6. Bidang Tata Ruang

Bidang tata ruang mempunyai tugas menyelenggarakan Pembinaan Tata Ruang, Pengendalian Tata Ruang, Survei dan Penertiban Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-dungan dan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan, pengendalian, survey dan penertiban tata ruang ;
- b. Pemberian petunjuk teknis dibidang perencanaan, pengendalian, survey dan penertiban tata ruang;
- c. Pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perencanaan, pengendalian, survey dan penertuban tata ruang;
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan , serta pengembangan dibidang perencanaan, pengendalian survey dan penertiban tata ruang;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian survey dan penertiban tata ruang;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengendalian , survey dan penertiban tata ruang;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Tata Ruang : mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan rencana tata ruang, pengaturan ruang dan pembinaan tata ruang;
- b. Seksi Pengendalian Tata Ruang : mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian Tata Ruang;
- c. Seksi Survei dan Penertiban Tata Ruang : mempunyai tugas menyelenggarakan survey dan penertiban tata ruang;

2. 1. 7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada biangnya masing-masing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kelompok Jabatan Fungsional di pimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara kelembagaan, eksistensi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor saat ini.

Sampai dengan akhir Tahun 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor didukung oleh sebanyak 69 Orang staff dengan perincian :

Tabel 2. 1. Daftar Perincian Golongan Pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019

No	Golongan/Ruang	Jumlah	Orang
1.	IV/e	-	-
2.	IV/d	-	-
3.	IV/c	1	orang
4.	IV/b	-	-
5.	IV/a	1	Orang
6.	III/d	5	Orang
7.	III/c	9	Orang
8.	III/b	20	Orang
9.	III/a	4	Orang
10.	II/d	10	Orang
11.	II/c	4	Orang
12.	II/b	12	Orang
13.	II/a	-	-
14.	I/d	-	-
15.	I/c	-	-
16.	I/b	-	-
17.	I/a	-	-
JUMLAH		68	Orang

Tabel 2. 2. Jumlah PNS/CPNS menurut pendidikan sebagai berikut

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Orang
1.	Strata 3 (S3)	-	-
2.	Strata 2 (S2)	2	Orang
3.	Strata 1 (S1)	31	Orang
4.	Diploma IV (DIV)	2	Orang
5.	Diploma III (DIII)	11	Orang
6.	Diploma II (DII)	-	Orang
7.	Diploma I (DI)	-	Orang
8.	SLTA	22	Orang
9.	SLTP	-	Orang
10.	SD	-	Orang
JUMLAH		68	Orang



Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian :

1. PNS : 68 Orang
2. CPNS : - Orang
3. Lain – Lain : - Orang (Honorar : 5 Orang, Kontrak Adm. :Orang).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

➤ **Asset / Modal**

Sampai pada akhir tahun 2019 jumlah asset yang dimiliki oleh DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor diantaranya yaitu Rp. 6.286.800.000,- berupa Asset tanah, Rp. 1.842.925.738,10,- berupa asset peralatan dan Mesin, Rp. 5.306.600.908,- berupa Asset gedung dan bangunan, Rp. 545.432.395.656,- berupa assaet jalan, irigasi dan jembatan serta Rp. 176.633.500,- berupa Asset kontruksi dalam penyelesaian. Asset tersebut dapat dilihat pada **Tabel**

2.3.

Tabel 2. 3. Daftar Asset Modal DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2019

Kode Rekening	Rekening	Tanah (KIB-A)		Peralatan dan Mesin (KIB-B)		Gedung dan Bangunan (KIB-C)		Jalan, Irigasi dan Jembatan (KIB-D)		Aset Tetap Lainnya (KIB-E)		Konstruksi dim Penyelesaian (KIB-F)	
		Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
1.3.1.01	Tanah Kantor	3	1.391.800.000,00										
1.3.1.23	Tanah Sarana Stadion Olahraga	1	4.657.500.000,00										
1.3.2.01	Alat-alat Berat			26	767.887.000								
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor			13	1.981.121.750								
1.3.2.10	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga			61	366.814.000								
1.3.2.11													
1.3.2.12													
1.3.2.15													
1.3.2.16													
1.3.3.01	Gedung Kantor					37	4798.987.908						
1.3.3.03	Gedung Rumah Dinas					1	52.700.000,00						
1.3.3.00	Gedung Lainnya					2	2.440.394.400,00						
1.3.3.07	Tugu Peringatan					2	507.613.000						
1.3.4.01	Jalan							372	486.280.553.503,00				
1.3.4.02	Jembatan							109	42.321.293.059,00				
1.3.4.03	Jaringan Air							39	17.043.382.389,00				
1.3.4.05	Instalasi Listrik dan Telepon							6	1.818.233.600,00				
1.3.6.01	Konstruksi Jalan											0	176.633.500,00
Total		4	6.286.800.000	263	7.295.973.000,00	42	5.306.600.908	526	547.463.462.551,00	0	0,00	0	176.633.500,00



2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Strategi pembangunan diarahkan untuk membangun Kabupaten Biak Numfor di segala bidang melalui salah satu misi Kabupaten Biak Numfor melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG adalah peningkatan pelayanan umum (publik service) meliputi peningkatan infrastruktur, sarana fisik seperti jalan, bangunan gedung, jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi. Capaian kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dapat diuraikan sebagai berikut di Tabel - C 23 dan Tabel T-C.24:



Tabel T-C. 23
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Biak Numfor**

1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	TOTAL RUTIN DAN PILIHAN	T																	
	JUMLAH PROGRAM RUTIN																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				77	77	77	77	77	77	77	77	77	77					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				68	-	-		-		-		-						





1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Aparatur																		
	Pembangunan gedung kantor		%		68														
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-	-	-	-										
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya																		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				12	12	12		12		12		12						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				12	12	12		12		12		12						
	JUMLAH PROGRAM PILIHAN																		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																		
	Panjang Jalan Yang Dibangun				19.528	23.646	23.646	27.764	27.764	31.882									
	Jembatan Dalam Kondisi Baik				95	120	120	145	145	170									
	Jalan Ring Road dan Dua jalur				1.250	2.925	2.925	2.925	2.925										
	Terbangunnya jalan ring road, jalan dua jalur dan jalan bagi masyarakat				20.778	26.571	26.571	30.689	30.689	31.882									





1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Terbangunnya Jembatan				58	97	97	136	136	175									
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong																		
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase /gorong-gorong				1.600	2.600	2.600	3.600	3.600	4.600									
	Panjang Rehabilitasi Pembangunan Pedestrian				1.000	2.000	2.000		3.000		4.000		5.000						
	Panjang Saluran drainase/gorong-gorong yang di bangun				710	710	710		710		710		710						
	Panjang Pembangunan Pedestrian				1.850	1.850	1.850		1.850		1.850		1.850						
	Jumlah resapan air yang dibangun				800	800	800		800		800		800						
	Terbangunnya drainase/gorong-gorong				710	710	710		710		710		710						
	Terbangunnya pedestrian/trotoar bagi pejalan kaki				1.850,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00		1.850,00		1.850,00						
					3	3	3		3		3		3						
	Terpeliharanya drainase				800	800	800		800		800		800						
	Panjang Turap/taludbrongjong yang dibangun				400														
	Terbangunnya turap/talud/brongjong				400														





1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi				427,40	427,40	427,40		427,40		427,40		427,40						
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan				427,40	427,40	427,40		427,40		427,40		427,40						
	Jumlah Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana (lokasi)												3						
	Jumlah RT yang memiliki sumur bor				6,00	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00						
	Terbangunnya sumur bor bagi masyarakat				6	6	6		6		6		6						
	Cakupan RT yang terakses Air Bersih				9,27	15,27	15,27		21,27		27,27		33,27						
	Jumlah Sanitasi				12,00	22,00	22,00		22,00		22,00		22,00						
	Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat				9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00						
	Terbangunnya MCK Plus bagi masyarakat				12,00	22,00	22,00		22,00		22,00		22,00						
	Jumlah Pengguna Energi Baru dan Terbarukan																		
	Panjang jalan desa yang dibangun				0,80	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00						
						1	1		1		1		1						





1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Terbangunnya jalan desa				0,80														
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan																		
	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan				24,55	27	27		27		27		27						
	Jumlah jembatan yang ditingkatkan																		
	Adanya peningkatan jalan				24,55	27,00	27,00		27,00		27,00		27,00						
	PERUMAHAN																		
	Jumlah Desa/Kampung yang Melaksanakan STBM												100						
	Jumlah Rumah layak Huni			-	88,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
				Pembangunan Perumahan Masyarakat Layak Huni	88	100	100		100		100		100						





Tabel T-C. 24

Anggaran dan Raelisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Biak Numfor

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun Ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
TOTAL RUTIN DAN PILIHAN	178.608.516,655	178.948.828.702	193.357.869.590	193.357.869.590	207.211.314.566	178.608.516,655	178.948.828.702	193.357.869.590	193.357.869.590	207.211.314.566							
JUMLAH PROGRAM RUTIN	16.675.737,800	716.311.580	760.942.738	760.942.738	810.037.012	16.675.737,800	716.311.580	760.942.738	760.942.738	810.037.012							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.737,815,00	694.311.580	736.742.738	736.742,738	783.417.012	670.737,815,00	694.311.580	736.742,738	736.742.738	783.417.012	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000,00	46.200.000	50.820.000	50.820,000	55.902.000	42.000.000,00	46.200.000	50.820.000	50.820.000	55.902.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.200.000,00	4.620.000	5.082.000	5.082.000	5.590.200	4.200.000,00	4.620.000	5.082.000	5.082.000	5.590.200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000,00	55.000.000	60.500.000	60.500,000	66.550.000	50.000.000,00	55.000.000	60.500.000	60.500.000	66.550.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	27.500.000	30.250.000	30.250,000	33.275.000	25.000.000,00	27.500.000	30.250.000	30.250.000	33.275.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	11.000.000	12.100.000	12.100,000	13.310.000	10.000.000,00	11.000.000	12.100.000	12.100.000	13.310.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	254.537,800,00	279.991.580		307.990,738	338.789.812	254.537,800,00	279.991,580		307.990,738	338.789,812	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Tenaga Harian	270.000.000,00	270.000.000,00		270.000,000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		270.000.000,00	270.000.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pembangunan gedung kantor	16.000.000.000					16.000.000.000											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		-		65.000.000	-		-		65.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					65.000.000					65.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IUMLAH PROGRAM PILIHAN	161.932.778.855	178.232.517.122	192.596.926.852	206.401.277.555	223.582.563.328	161.932.778.855	178.232.517.122	192.596.926.852	206.401.277.555	223.582.563.328	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	101.100.000.000	111.210.000.000	122.331.000.000	69.541.791.000	145.824.360.000	101.100.000.000	111.210.000.000	122.331.000.000	132.567.600.000	145.824.360.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Panjang Jalan Yang Dibangun	93.800.000.000,00	103.180.000.000,00	113.498.000.000,00	124.847.800.000,00	137.332.580.000,00	93.800.000.000,00	103.180.000.000,00	113.498.000.000,00	124.847.800.000,00	137.332.580.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jembatan Dalam Kondisi Baik	5.800.000.000	6.380.000.000	7.018.000.000	7.719.800.000	8.491.780.000	5.800.000.000	6.380.000.000	7.018.000.000	7.719.800.000	8.491.780.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jalan Ring Road dan Dua jalur		1.650.000.000	1.815.000.000				1.650.000.000	1.815.000.000			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terbangunnya jalan ring road, jalan dua jalur dan jalan bagi masyarakat	93.800.000.000,00	103.180.000.000,00	113.498.000.000,00	124.847.800.000,00	137.332.580.000,00	93.800.000.000,00	103.180.000.000,00	113.498.000.000,00	124.847.800.000,00	137.332.580.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun Ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Terbangunnya Jembatan	8.491.780.000	6.380.000.000	7.719.800.000			8.491.780.000	6.380.000.000	7.719.800.000			100	85%	85%	100	100		
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6.440.000.000	6.510.000.000	6.587.000.000	6.671.700.000	6.764.870.000	6.440.000.000	6.510.000.000	6.587.000.000	6.671.700.000	6.764.870.000	100	85%	85%	100	100		
Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase /gorong-gorong	700.000.000	770.000.000	847.000.000	931.700.000	1.024.870.000	700.000.000	770.000.000	847.000.000	931.700.000	1.024.870.000	100	85%	85%	100	100		
Panjang Rehabilitasi Pembangunan Pedestrian											100	85%	85%	100	100		
Panjang Saluran drainase/gorong-gorong yang di bangun	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	100	85%	85%	100	100		
Panjang Pembangunan Pedestrian	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	100	85%	85%	100	100		
Jumlah resapan air yang dibangun	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100	85%	85%	100	100		
											100	85%	85%	100	100		
Terbangunnya drainase/gorong-gorong	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	100	85%	85%	100	100		
											100	85%	85%	100	100		
Pembangunan Pedestrian/trotoar	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	100	85%	85%	100	100		
											100	85%	85%	100	100		
Pembangunan Resapan air	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100	85%	85%	100	100		
											100	85%	85%	100	100		
Terpeliharanya drainase	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100	85%	85%	100	100		
											100	85%	85%	100	100		
Panjang Turap/taludbrongjong yang dibangun	106.000.000					106.000.000					100	85%	85%	100	100		





Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun Ke-					Rata -Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Terbangunnya turap/talud/brongjong	106.000.000																
Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	106.000.000											
	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00							
Jumlah Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana (lokasi)		-	-	-	-	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00	1.876.248.000,00							
Jumlah RT yang memiliki sumur bor	3.711.449.655,00	3.711.449.655,00	3.711.449.655,00		3.711.449.655,00												
Terbangunnya sumur bor bagi masyarakat	3.711.449.655	3.711.449.655	3.711.449.655		3.711.449.655	3.711.449.655,00	3.711.449.655,00	3.711.449.655,00			3.711.449.655,00						
	6.732.463.000	8.202.682.167	8.202.682.167	8.202.682.167	8.202.682.167	3.711.449.655	3.711.449.655	3.711.449.655			3.711.449.655						
Cakupan RT yang terakses Air Bersih	4.968.200.000	4.968.200.000	4.968.200.000		4.968.200.000												
Jumlah Sanitasi	1.764.263.000,00	3.234.482.166,67	2.612.430.500		3.234.482.166,67	6.732.463.000	8.202.682.167	8.202.682.167	8.202.682.167	8.202.682.167							
						4.968.200.000	4.968.200.000	4.968.200.000			4.968.200.000						
Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat	4.968.200.000,00	4.968.200.000,00	4.968.200.000,00		4.968.200.000,00	1.764.263.000,00	3.234.482.166,67	3.234.482.166,67			3.234.482.166,67						





Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Terbangunnya MCK Plus bagi masyarakat	1.764.263.000,00	3.234.482.166,67	4.968.200.000,00			1.764.263.000,00	3.234.482.166,67	4.968.200.000,00			100	95	95	95	95		
Jumlah Pengguna Energi Baru dan Terbarukan			3.234.482.166,67					3.234.482.166,67			100	95	95	95	95		
Panjang jalan desa yang dibangun	1.064.248.000,00	1.064.248.000,00	875.000.000,00			1.064.248.000,00	1.064.248.000,00	875.000.000,00			100	95	95	95	95		
Terbangunnya jalan desa		1.064.248.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00		1.064.248.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	100	95	95	95	95		
		28.785.543.000,00	31.664.097.300,00	34.830.507.030,00	38.313.557.733,00		28.785.543.000,00	31.664.097.300,00	34.830.507.030,00	38.313.557.733,00	100	95	95	95	95		
Panjang Jalan Yang Ditingkatkan		28.785.543.000,00	31.664.097.300,00	34.830.507.030,00	38.313.557.733,00		28.785.543.000,00	31.664.097.300,00	34.830.507.030,00	38.313.557.733,00	100	95	95	95	95		
Jumlah jembatan yang ditingkatkan											100	95	95	95	95		
Adanya peningkatan jalan		28.785.543.000,00	31.664.097.300,00	34.830.507.030,00	38.313.557.733,00		28.785.543.000,00	31.664.097.300,00	34.830.507.030,00	38.313.557.733,00	100	95	95	95	95		
											100	95	95	95	95		
Jumlah Desa/Kampung yang Melaksanakan STBM			-	-	-			-	-	-	100	95	95	95	95		
Jumlah Rumah layak Huni		12.481.075.200,00	14.183.040.000,00	14.183.040.000,00	14.183.040.000,00		12.481.075.200,00	14.183.040.000,00	14.183.040.000,00	14.183.040.000,00	100	95	95	95	95		
Pembangunan Perumahan Masyarakat Layak Huni		12.481.075.200,00	14.183.040.000,00	14.183.040.000,00	14.183.040.000,00		12.481.075.200,00	14.183.040.000,00	14.183.040.000,00	14.183.040.000,00	100	95	95	95	95		





2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman ke depan erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor ialah bagaimana pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan).

Mencermati kondisi sumber daya dan tingkat kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG selam 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan seperti di bawah ini :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, diharapkan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis. Selain itu juga ditunjang oleh Pendidikan Formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Karena aparat di bidang teknik bukan hanya di DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat yang berada di SKPD lain termasuk Pemerintah Distrik dan Desa dan Kelurahan, bahkan sampai kepada kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.



Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah pada tahun 2019 diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Sarana dan Prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa Jalan, Jembatan, jaringan air bersih maupun Perumahan dan Permukiman serta pembangunan fisik lainnya. Disamping itu diharapkan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor juga telah memiliki *database* dan *masterplan* pekerjaan fisik diberbagai sektor/bidang pembangunan. Dengan adanya *database* dan *masterplan* tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat. Pada tahun 2019 tersebut, juga diharapkan telah tersedia sarana dan alat penunjang setiap pekerjaan teknis yang layak dan modern.

b. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil Pembangunan Infrastruktur Daerah Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota, diharapkan pada tahun 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor dapat menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan infrastruktur Kabupaten Biak Numfor. Hal ini ditandai dengan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat dan stakeholder secara merata sesuai dengan amanat PP No 65 Tahun 2005 dan Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu – isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Biak Numfor. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat dalam yang belum ideal. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Biak Numfor.



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1.a. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan 1.b. belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik 1.c. belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah 1.d. belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan	Permasalahan Pembangunan	Permasalahan pembangunan daerah tersebut selanjutnya diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kab. Biak Numfor berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kab. Biak Numfor sesuai dengan pembangian urusan.
2.	Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal.	Permasalahan pembangunan daerah	diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Biak Numfor yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan
3.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1.a. Pekerjaan umum	1.a. Pembangunan bidang Pekerjaan Umum berupa prasarana jalan, jembatan, air minum dan sanitasi diperlukan dalam kehidupan sehari hari guna memenuhi keperluan standar hidup seseorang untuk itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1). Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi baik masih belum mencapai target; 2). Proporsi jalan Provinsi dengan kondisi baik masih belum mencapai target; 3). Masih terbatasnya prasarana jalan khususnya jalan non status yang menghubungkan sektor unggulan dengan kawasan penunjang di kabupaten biak numfor; 4). Masih rendahnya akses



		1.b. Penataan ruang	<p>penduduk terhadap air minum dan sanitasi;</p> <p>5). Terbatasnya layanan air minum (hanya di daerah perkotaan)</p> <p>1.b). Masih banyak kawasan yang terjadi ketidak cermatan di dalam pendigitasian kawasan hutan;</p> <p>1.c). Ketetapan ruang terbuka hijau 60 persen dari luas kota yang menyulitkan perkembangan kota.</p>
4.	<p>Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, <i>unpredictabel</i> dan <i>boundless</i> menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan.</p>	Fungsi Penunjang Pemerintah	<p>a) Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;</p> <p>b) Terbatasnya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan;</p> <p>c) Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai <i>feedback</i> dalam proses pembangunan daerah;</p> <p>d) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian;</p> <p>e) Lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.</p>

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.1.1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

- Mewujudkan pembangunan Infrastruktur dasar (fisik dan sosial) dan strategis merupakan kebutuhan pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk menjamin ekonomi sektor publik dan sektor privat





sebagai bentuk layanan dengan memberikan fasilitas yang diperlukan dan memberikan dampak yang menguntungkan (strategis) agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor. Infrastruktur fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas berupa jalan, air bersih, bandara, irigasi, tanggul, pengolahan limbah, listrik, telekomunikasi, pelabuhan maupun infrastruktur sosial di bidang Pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dan rumah sakit.

- Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian di Kabupaten Biak Numfor, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk generasi sekarang dan generasi di masa depan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat Kabupaten Biak Numfor dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Oleh karena itu upaya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Biak Numfor dengan berorientasi market driven (ekonomi), dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan.
- Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada: Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan tata ruang wilayah di Kabupaten Biak Numfor harus memperhatikan perkembangan permasalahan di provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah



Kabupaten yang berbatasan, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

- Rencana tata ruang wilayah Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- upaya peningkatan *pemenuhan hak-hak dasar dan sekunder masyarakat*, agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Pemenuhan hak-hak dasar dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, peningkatan kapasitas perhubungan udara, darat dan laut, pengembangan perumahan dan permukiman dan penataan kawasan kumuh yang berwawasan lingkungan, peningkatan kapasitas infrastruktur sumberdaya air, memenuhi infrastruktur dasar masyarakat pesisir dan infrastruktur penunjang PON 2020 klaster Biak serta meningkatkan kapasitas penanganan bencana

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi



pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) Memenuhi kriteria-kriteria indikator yang baik dan berkualitas.

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Paniai periode 2018-2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- 2) Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;



- 3) Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- 4) Merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, paling tidak dapat memenuhi seluruh indikator sasaran pokok RPJPD pada periode RPJMD berjalan; dan
- 5) Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.

Sesuai dengan tahapan perumusan tujuan dan sasaran yang dijabarkan di atas, berikut ini disampaikan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan oleh Kabupaten Biak Numfor selama masa pembangunan lima tahun mendatang (2019-2024) dalam upaya mewujudkan visi ***“Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter Dan***

Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan Dan Kemandirian” yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Misi 1 memiliki 5 tujuan dan 13 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas
 - Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan
 - Meningkatnya budaya baca masyarakat
 - Terwujudnya Biak Numfor sebagai Kota Tujuan Belajar Wilayah Saireri dan Papua
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
 - Meningkatnya derajat dan akses kesehatan masyarakat
 - Meningkatnya kualitas manajemen rumah sakit dan puskesmas
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat



3. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Pemuda dalam Pembangunan

- Meningkatnya pembinaan bagi pemuda
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
 - Meningkatnya kesempatan kerja
 - Meningkatnya daya saing tenaga kerja
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Religiusitas Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya
- Meningkatnya pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat
 - Meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum
 - Terwujudnya proteksi terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli Biak

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah

Misi 2 memiliki 3 tujuan dan 8 sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing :
- Meningkatnya pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan
 - Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan
 - Terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM
2. Meningkatkan Potensi Kawasan Strategis dalam Memajukan Sektor Perdagangan dan Investasi :
- Meningkatnya skala usaha jasa perdagangan
 - Meningkatnya daya saing dan investasi antar wilayah
 - Bertumbuhnya iklim investasi pada sektor-sektor unggulan daerah



3. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Promosi Wisata
 - Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat
 - Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah)

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima

Misi 3 memiliki 2 tujuan dan 6 sasaran sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel
 - Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin
 - Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah
 - Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
2. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan
 - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
 - Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak



Misi 4 : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang

Misi 4 memiliki 2 tujuan dan 6 sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Perkembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Peningkatan akses transportasi dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah kepulauan
 - Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten
 - Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
 - Meningkatnya ketersediaan energi baru terbarukan
 - Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah
2. Mewujudkan Kesadaran Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Visi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah tersusunnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang handal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 dengan misi :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mitra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air serta mengurangi resiko daya rusak air.



3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman uag terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstuksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapn : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsi-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Tabel 3. 1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua , Visi : “Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera”

Misi V: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan				
1	2	3	4	
1.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah.	-	Tingkat ketersediaan dan fungsional jalan nasional dan provinsi.
			-	Terbangunnya jaringan jalan PKN-PKW, antar PKW serta PKW-PKL.
			-	Tingkat



	-	ketersediaan dan fungsional bandara.
	-	Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah.	-	Prosentase cakupan sistem jaringan sumberdaya air terhadap irigasi.
	-	Prosentase cakupan sistem Pengendalian banjir dan abrasi.
	-	Tingkat ketersediaan air tanah.
Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.	-	Prosentase ibu kota distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi.
Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan.	-	Rasio elektrifikasi.
	-	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi alternative.
	-	Daya terpasang.
Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.	-	tingkat ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.
	-	Meningkatnya





				ketersediaan air bersih.
2.	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	-	Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
		Papua sebagai paru-paru dunia.	-	Emisi GRK.
			-	Serapan GRK.
			-	Luas tutupan hutan primer dan sekunder.
		Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.	-	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.
		Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan.	-	Persentase pemangku kepentingan yang memahami pembangunan berkelanjutan.
			-	Jumlah dokumen perencanaan yang mengakomodir pembangunan berkelanjutan.

Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Biak Numfor dan RPJMD Propinsi Papua dalam mewujudkan RPJMD Tahun 2020-2025 ada dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

a. Faktor - faktor penghambat :

- Terbatasnya sarana dan prasarana.
- Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.
- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- Terbatasnya anggaran yang tersedia.





b. Faktor - faktor pendorong :

- Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
- Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
- Tersedianya Standar Operating Prosedure (SOP), tersedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Kemajuan informasi dan teknologi.
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Dukungan dana.

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Biak Numfor terletak di sebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara astronomi terletak pada $0^{\circ} 55' - 1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan dan $134^{\circ} 47' - 136^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta sekitar 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido.

3.3.2. Perwilayahan Pembangunan

Perwilayahan pembangunan dilaksanakan sebagai penjabaran strategi keterpaduan antar sektor yang dapat menjamin peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan. Didalam Struktur susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

A. Perkotaan

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang secara umum terdiri atas :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;



- d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa desa/kampung dan;
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/kampung.

Rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten Biak Numfor, terdiri atas :

1. PKNp/PKW: Biak (Distrik Biak Kota), Samofa (Distrik Samofa).
PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Dalam PP No. 27/2008 tentang RTRWN, Biak ditentukan sebagai PKW. Karena potensi serta prospek perkembangannya, dalam draft RTRW Provinsi Papua, perkotaan Biak diusulkan menjadi PKNp. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional, atau beberapa Provinsi. Biak sebagai PKW merupakan pusat dari SWP III Provinsi Papua dengan wilayah pengembangan Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Waropen.
2. PKLp: Yemburwo (Distrik Numfor Timur), Orkhdori (Distrik Swandiwe), Andei (Distrik Biak Utara), Yomdori (Distrik Biak Barat), Pasi (Distrik Aimando).
PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa distrik. Beberapa distrik di Kabupaten Biak Numfor diusulkan menjadi PKL, sesuai potensi dan prospek pengembangan masing-masing :
 - Yemburwo: memiliki bandara, yang merupakan prasarana transportasi utama penghubung Pulau Numfor dengan Pulau Biak.
 - Orkhdori: merupakan distrik perbatasan dengan Kabupaten Supiori, sehingga pertumbuhannya perlu didorong agar mengimbangi perkembangan yang berlangsung di Kabupaten Supiori.
 - Yomdori dan Pasi: memiliki pelabuhan sebagai prasarana transportasi angkutan orang dan barang, penghubung Kepulauan Padaido dengan Pulau Biak.
3. PPK: Sandauw (Distrik Bruyadori), Yereboy (Distrik Warsa), Yendidori (Distrik Yendidori), Wadibo (Distrik Oridek).
PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung. Sebagai PPK, perkotaan Sandauw, Yeruboy, Yendidori, dan Wadibu tidak



memiliki fasilitas prasarana transportasi penting (kecuali Sandauw yang memiliki pelabuhan, yaitu Pelabuhan Manggari) dan sarana perdagangan dalam skala kabupaten. Namun perkotaan tersebut memiliki fasilitas permukiman yang dapat melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung, seperti fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan.

4. PPL: Kansai (Distrik Numfor Barat), Rawar (Distrik Orkeri), Andei (Distrik Poiru), Bosnik (Distrik Biak Timur), Roidifu (Distrik Andey Dalam), Soor (Distrik Yawosi), Sansudi (Distrik Bondifuar), Pai (Distrik Padaido). Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung.

Pusat-pusat pelayanan di PPL memiliki fasilitas permukiman dasar (sarana pendidikan dan kesehatan) yang dapat melayani kegiatan skala antar kampung. Pusat pelayanan di Distrik Yawosi dari Yawosi dipindahkan ke Soor, dikarenakan faktor fisik dasar dan pencegahan terhadap terjadinya bencana.

B. Perkampungan

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Geolokasi kampung menjadi aspek penting dalam rencana tata ruang wilayah di Provinsi Papua, mengingat bahwa kampung merupakan representasi keberadaan masyarakat adat.

Berdasarkan SK Bupati Biak Numfor No. 146/678 tentang Wilayah Administrasi, jumlah kampung di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 195 kampung (dan kelurahan), tetapi hanya 145 kampung yang diketahui koordinatnya.

C. Sistem Perwilayahan

Karakter perkembangan wilayah di Kabupaten Biak Numfor cenderung linier, mengikuti kawasan pesisir, dimana antara wilayah pesisir timur dan pesisir barat dipisahkan oleh kawasan hutan dibagian tengahnya. Sistem jaringan jalan juga berpola mengikuti perkembangan kawasan permukiman.

Berdasarkan kondisi geografis seperti di atas serta hierarki pusat-pusat kegiatan maka rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada Rencana Struktur Ruang, serta penjelasan rencana sistem perwilayahannya dijelaskan sebagai berikut :

1. SSWP I

- Pusat kegiatan : perkotaan Biak.
- Wilayah pelayanan : Distrik Samofa, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, dan Distrik Oridek.



- Kegiatan utama : perdagangan dan jasa (komersial, sosial, pemerintahan), industri, transportasi, konservasi, pariwisata, kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan serta permukiman.
- 2. SSWP II
 - Pusat kegiatan : perkotaan Yomdori .
 - Wilayah pelayanan : Distrik Biak Barat, Distrik Yendidori.
 - Kegiatan utama : transportasi, kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan serta permukiman.
- 3. SSWP III
 - Pusat kegiatan : perkotaan Andei.
 - Wilayah pelayanan : Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara.
 - Kegiatan utama : konservasi, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanian, permukiman, transportasi.
- 4. SSWP IV
 - Pusat kegiatan : perkotaan Orkhdori
Orkhdori merupakan pusat kegiatan dengan fasilitas minimum dibanding dengan pusat-pusat kegiatan yang lain. Mengingat bahwa orkhdori berada di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Supiori maka perkembangan Orkhdori perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan struktur ruang.
 - Wilayah pelayanan : Distrik Swandiwe, Distrik Bondifuar.
 - Kegiatan utama : kehutanan, kelautan dan perikanan, serta permukiman.
- 5. SSWP V
 - Pusat kegiatan : perkotaan Yemburwo
 - Wilayah pelayanan : Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, Distrik Bruyadori, Distrik Orkeri, Distrik Numfor Barat.
 - Kegiatan utama : kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, transportasi, dan permukiman.
- 6. SSWP VI
 - Pusat kegiatan : perkotaan Pasi
 - Wilayah pelayanan : Distrik Padaido, Distrik Aimando.

Kegiatan utama : konservasi, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, dan permukiman.

b. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

➤ **Metode Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pengertian isu kritical/strategis adalah “kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritical/strategis menceminkan persoalan-persoalan yang



berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah ke-PU-an yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal SKPD Dinas PU dapat menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dan menjadi isu yang kritis/strategis. Dalam perumusan isu strategis, perlu memperhatikan antara lain:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Penyerahan urusan pemerintah bidang PU dan penataan ruang menjadi urusan daerah.
- c. Visi misi kepala daerah terpilih
- d. Rencana strategis Kementerian PU yang masih berlaku
- e. RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang masih berlaku
- f. Pencapaian kinerja Renstra SKPD Dinas PU terdahulu.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi dunia usaha.

➤ **Isu-Isu Strategis Bidang Pekerjaan Umum**

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis bidang pekerjaan umum yaitu :

- a) Pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan prasarana dan sarana (kuantitas, kualitas, fungsional) sebagai amanat PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b) Untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama penyediaan air bersih dan sanitasi untuk wilayah-wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih termasuk wilayah kepulauan.
- c) Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur ke-PU-an melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.
- d) Hasil pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara aman dan nyaman bagi semua golongan masyarakat terutama penduduk asli Papua, termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (*special needs*) seperti lansia, anak-anak, dan difable



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

TUJUAN :

- a) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur dan kapasitas SDM.
- b) Meningkatkan ketersediaan jalan dan jembatan yang memadai.
- c) Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman layak huni.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat yang kesulitan air bersih.
- e) Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai.
- f) Meningkatkan ketersediaan database dan kualitas perencanaan ke-PU-an

Misi 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, disiplin, dan profesionalisme aparatur

Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur dan kapasitas SDM



Sasaran	Indikator
1. Meningkatnya kualitas SDM yang menguasai bidang teknis ke-PU-an dan SDM administrasi keuangan dan perkantoran yang disiplin	% aparat yang mengikuti diklat struktural dan diklat teknis
2. Meningkatnya sarana prasarana kantor dan lapangan yang memadai	% sarana dan parasarana kantor dan peralatan lapangan yang tersedia
Misi 2. Mewujudkan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas.	
Tujuan : Meningkatkan ketersediaan jalan dan jembatan yang memadai.	
1. Meningkatnya mutu dan pemenuhan jalan	Meningkatnya persentase (%) panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
2. Meningkatnya mutu jembatan	Meningkatnya persentase (%) jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik.
Misi 3. Mewujudkan permukiman yang layak huni bagi masyarakat.	
Tujuan . Meningkatkan ketersediaan permukiman layak huni.	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan	Meningkatnya rasio rumah layak huni.
Misi 4. Mewujudkan sarana dan prasarana air bersih yang memadai dan bermanfaat bagi masyarakat	
Tujuan . Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih	Meningkatnya persentase (%) rumah tangga yang bisa terpenuhi kebutuhan air bersih
Misi 5. Pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum	
Tujuan : Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai	
1. Tersedianya sarana prasana dan fasilitas pelayanan umum yang strategis	Terbgunanya Water Front City Jalan Ring Road selesai 100 %
2. Meningkatnya jumlah fasilitas umum	Kantor Bupati selesai 100 %





Sasaran	Indikator
dan perkantoran sesuai kebutuhan	
Misi 6. Mewujudkan terciptanya sistem survei dan pengendalian serta perencanaan yang optimal	
Tujuan : Meningkatkan sistem basis data wilayah yang yang akurat	
1. Tersedianya basis data bidang ke-PU-an yang lengkap dan akurat.	Meningkatnya jumlah sistem basis data di semua bidang

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) Memenuhi kriteria-kriteria indikator yang baik dan berkualitas.





No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023
T1	Mewujudkan percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Perkembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kemahalan Konstruksi	133,76	125,32	116,88	108,44	100
S1	Peningkatan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah kepulauan	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,007213	0,013213	0,019213	0,025213	0,031213
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	73	76	79	82	85
		Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	82,4	86,8	91,2	95,6	100
		Persentase layanan angkutan (darat dan laut)	88	91	94	97	100
S2	Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	58,8	61,6	64,4	67,2	70

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Panai periode 2018-2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- 2) Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-



isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;

- 3) Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- 4) Merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, paling tidak dapat memenuhi seluruh indikator sasaran pokok RPJPD pada periode RPJMD berjalan; dan
- 5) Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.

Sesuai dengan tahapan perumusan tujuan dan sasaran yang dijabarkan di atas, berikut ini disampaikan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan oleh Kabupaten Biak Numfor selama masa pembangunan lima tahun mendatang (2019-2024) dalam upaya mewujudkan visi

“Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter Dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan Dan Kemandirian”

yaitu :

Misi 4 : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang

Misi 4 memiliki 2 tujuan dan 6 sasaran sebagai berikut:

3. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Perkembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Peningkatan akses transportasi dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah kepulauan
 - Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten
 - Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
 - Meningkatnya ketersediaan energi baru terbarukan
 - Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah



4. Mewujudkan Kesadaran Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

Konsistensi antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat lebih lengkap pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang	Mewujudkan Percepatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Perkembangan Wilayah dan Pertmbuhan Ekonomi	Peningkatan akses transportasi dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah kepulauan
		Implementasi Rencana tata Ruang wilayah secara konsisten
		Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
		Meningkatnya ketersediaan energy baru terbarukan
		Meningkatnya jangkauan pelayanan system komunikasi dan informasi antar wilayah
		Mewujudkan Kesadaran Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI KEBIJAKAN

Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Biak Numfor lima tahun kedepan (2018-2023) yang lebih terarah, visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam strategi yang akan menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), dengan tahapannya meliputi:
 - a. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) dan mengkaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan di ketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi di rumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis;



- b. Menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.
- c. Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif yaitu :
 - 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
 - 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
 - 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan berbagai langkah dan pemetaan strategi yang merujuk kepada Analisa SWOT dan lintas empat perspektif di atas telah dapat dirumuskan strategi-strategi kebijakan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan guna mewujudkan visi Kabupaten Biak Numfor periode 2018-2023, yang diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan bidang pembangunan yaitu Bidang Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Lingkungan Hidup dan *Good Governance*, sebagai berikut.



Tabel 5. 1 Keselarasan Misi dengan Strategi Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan ketersediaan kualitas tenaga pendidikan PAUD yang merata di seluruh distrik
			Peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah
			Peningkatan penilaian / akreditasi penyelenggara pendidikan
			Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program keselarasan disiplin ilmu
		Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan, kualitas dan kepastian pendidikan	
		Terwujudnya Biak Numfor	Peningkatan daya saing daerah



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		sebagai Kota Tujuan Belajar Wilayah Saireri dan Papua	melalui pendidikan yang terpusat di Biak Numfor
		Meningkatnya budaya baca masyarakat	Peningkatan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca
		Meningkatnya derajat dan akses kesehatan masyarakat	Optimalisasi pembinaan upaya kesehatan masyarakat dan bina gizi ibu dan anak
			Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan serta pemenuhan imunisasi bayi dan balita yang intensif
			Optimalisasi cakupan pelayanan terhadap kesehatan lansia
			Pemantauan terhadap distribusi obat





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			dan makanan yang intensif
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pengendalian faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan surveilans
		Terciptanya penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana
			Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)
		Meningkatnya kualitas manajemen rumah sakit dan puskesmas	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
			Pembayaran iuran jaminan pelayanan





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu
			Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, dan perkembangan ilmu kesehatan
			Peningkatan sertifikasi tenaga kesehatan
			Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan
			Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan
			Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan
			Pemeliharaan sarana dan





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat	Pemenuhan sarana prasarana sanitasi untuk menuju terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat
	Meningkatkan Partisipasi dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya pembinaan bagi pemuda	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan untuk memperkuat sinergitas dengan arah kebijakan pembangunan
			Peningkatan sistem pembinaan atlet melalui cabang-cabang olahraga dan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Optimalisasi pelayanan penyandang masalah kesejahteraan





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi		
			sosial		
			Peningkatan kesejahteraan bagi anak panti asuhan/panti jompo		
			Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		
		Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan ketrampilan pencari kerja		
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Perluasan kesempatan kerja		
		Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Religiusitas Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat	Meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum	Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama
					Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kerukunan hidup bermasyarakat
					Pembinaan masyarakat dan organisasi





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			tertentu dalam event bela Negara, pembauran kebangsaan dan wawasan kebangsaan
			Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan
		Terwujudnya proteksi terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli Biak	Peningkatan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal
Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan	Peningkatan kesejahteraan petani melalui pembinaan yang masif dan berkelanjutan
			Peningkatan budaya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
			Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
			Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan
		Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk perikanan
			Peningkatan produktivitas perikanan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok nelayan secara berkelanjutan





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM	Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT
	Meningkatkan Potensi Kawasan Strategis dalam Memajukan Sektor Perdagangan dan Investasi	Meningkatnya skala usaha jasa perdagangan	Peningkatan akses dan informasi pasar dan pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan
		Meningkatnya daya saing dan investasi antar wilayah	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar Optimalisasi pemberdayaan PKL dan pengusaha perempuan dalam sektor perdagangan





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	
		Bertumbuhnya iklim investasi pada sektor-sektor unggulan daerah	Peningkatan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional dengan menjaga investasi yang sudah ada serta melalui promosi	
			Perbaikan kualitas layanan perijinan dengan menyederhanakan proses birokrasi	
		Mewujudkan perekonomian kampung yang mandiri	Revitalisasi BUMD dengan difokuskan pada sektor produk unggulan	
	Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Promosi Wisata		Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat	Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah
				Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah
			Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah)	Peningkatan intensitas promosi pariwisata, baik melalui kerjasama dengan Pemerintah,





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Pemerintah Daerah lain, swasta ataupun secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin	Optimalisasi sistem penilaian pemberian penghargaan ASN dalam mendorong profesionalisme ASN, serta pemberlakuan sanksi dalam mendorong produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
			Peningkatan fasilitasi dan pembinaan aparatur yang produktif dan profesional
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi peran Distrik dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		dan pelayanan publik	Respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
			Harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin
			Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda
			Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam semua bidang
			Peningkatan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD
			Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Pembinaan Infentarisasi dan Penyusunan Data Partisipasi tertib Arsip





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Peningkatan kualitas pengelolaan aspirasi dan isu-isu publik serta pengelolaan data dan informasi kebijakan publik untuk layanan informasi
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas tata kelola, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi.
		Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat Biak Numfor	Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Pendokumentasian perencanaan pembangunan secara sistematis dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up secara terpadu
		Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Peningkatan standar kompetensi dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)
			Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi
			Penyediaan data dan informasi yang valid dan akuntabel untuk mendukung perencanaan
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan	Peningkatan kesempatan berkarir bagi perempuan di berbagai bidang pekerjaan





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Upaya Perlindungan anak	Peningkatan kesempatan untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
			Optimalisasi kampung ramah anak
Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Perkembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah kepulauan	Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Jaringan jalan dan jembatan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan khusus
			Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan rob serta mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			rehabilitasi saluran/ drainase
			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara yang memadai
			Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
			Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan
		Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang
			Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
		Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman
			Penyediaan jaringan irigasi secara memadai bagi terpenuhinya kebutuhan pengairan
			Optimalisasi pengelolaan, peningkatan layanan, dan akses masyarakat terhadap air minum
		Meningkatnya ketersediaan energi baru terbarukan	Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah	Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah serta Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Optimlisisasi pengolahan sampah perkotaan secara ramah lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi
			Peningkatan ruang terbuka hijau melalui revitalisasi serta penambahan Taman kota dan taman di lingkungan RT/RW
			Pemantauan dan penegakan aturan





Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			tentang pengendalian pencemaran air dan udara
			Peningkatan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, dan optimalisasi rehabilitasi paska bencana
			Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi
			Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat

5.2. ARAH KEBIJAKAN TEMA PEMBANGUNAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.





Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan. Adapun langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
4. Merumuskan draft arah kebijakan;
5. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. Memutuskan arah kebijakan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Karakter perkembangan wilayah di Kabupaten Biak Numfor cenderung linier, mengikuti kawasan pesisir, dimana antara wilayah pesisir timur dan pesisir barat dipisahkan oleh kawasan hutan dibagian tengahnya. Sistem jaringan jalan juga berpola mengikuti perkembangan kawasan permukiman.



Berdasarkan kondisi geografis seperti di atas serta hierarki pusat-pusat kegiatan maka rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada gambar 6.1 Sistem Perwilayahan, serta penjelasan rencana sistem perwilayahannya dijelaskan sebagai berikut :

7. SSWP I

- Pusat kegiatan : perkotaan Biak.
- Wilayah pelayanan : Distrik Samofa, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, dan Distrik Oridek.
- Kegiatan utama : perdagangan dan jasa (komersial, sosial, pemerintahan), industri, transportasi, konservasi, pariwisata, kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan serta permukiman.

8. SSWP II

- Pusat kegiatan : perkotaan Yomdori .
- Wilayah pelayanan : Distrik Biak Barat, Distrik Yendidori.
- Kegiatan utama : transportasi, kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan serta permukiman.

9. SSWP III

- Pusat kegiatan : perkotaan Andei.
- Wilayah pelayanan : Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara.
- Kegiatan utama : konservasi, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanian, permukiman, transportasi.

10. SSWP IV

- Pusat kegiatan : perkotaan Orkhdori

Orkhdori merupakan pusat kegiatan dengan fasilitas minimum dibanding dengan pusat-pusat kegiatan yang lain. Mengingat bahwa orkhdori berada di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Supiori maka perkembangan Orkhdori perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan struktur ruang.

- Wilayah pelayanan : Distrik Swandiwe, Distrik Bondifuar.
- Kegiatan utama : kehutanan, kelautan dan perikanan, serta permukiman.

11. SSWP V

- Pusat kegiatan : perkotaan Yemburwo



- Wilayah pelayanan : Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, Distrik Bruyadori, Distrik Orkeri, Distrik Numfor Barat.
- Kegiatan utama : kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, transportasi, dan permukiman.

12. SSWP VI

- Pusat kegiatan : perkotaan Pasi
- Wilayah pelayanan : Distrik Padaido, Distrik Aimando.
- Kegiatan utama : konservasi, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, dan permukiman.



Gambar 5. 2 Sistem Perwilayahan Rencana Struktur Kabupaten Biak Numfor.



Tema pembangunan merupakan payung utama pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada masing-masing tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Biak Numfor selama 5 (lima) tahun pelaksanaan (2018-2023), yang dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

- 1. Tema Pertama Tahun 2019 : Pemerataan dan Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**
- 2. Tema Kedua Tahun 2020 : Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan**
- 3. Tema Ketiga Tahun 2021 : Percepatan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensial Unggulan Sebagai Sumbu Pertumbuhan**
- 4. Tema Keempat Tahun 2022 : Meningkatnya Daya Saing Daerah untuk Pemerataan Kesejahteraan Menuju Kemandirian**
- 5. Tema Kelima Tahun 2023 : Memantapkan terwujudnya Biak Numfor yang Mandiri dan Sejahtera**

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu



pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Tetapi, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Berikut ini disampaikan pemetaan horizon waktu perumusan arah kebijakan untuk Kabupaten Biak Numfor selama periode 2019-2023 berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.



Tabel 5. 2 Pemetaan Waktu Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1
	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan kesejahteraan petani melalui pembinaan yang masif dan berkelanjutan	√	√	√	√	√
Peningkatan budaya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	√	√	√	√	√
Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian			√	√	√
Peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan	√	√	√	√	√
Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan		√	√	√	√
Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk perikanan		√	√	√	√
Peningkatan produktivitas perikanan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan	√	√	√	√	√



Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema	Tema	Tema	Tema	Tema
	/	/	/	/	/
	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus
1	1	1	1	1	
2019	2020	2021	2022	2023	
kelompok nelayan secara berkelanjutan					
Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil			√	√	√
Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT	√	√	√		
Peningkatan akses dan informasi pasar dan pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor				√	√
Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan	√	√	√	√	√
Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar	√	√	√	√	√
Optimalisasi pemberdayaan PKL dan pengusaha perempuan dalam sektor perdagangan	√	√	√		
Peningkatan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional dengan menjaga investasi yang sudah ada serta melalui promosi	√	√	√	√	√
Perbaikan kualitas layanan perijinan dengan menyederhanakan proses birokrasi	√	√	√		
Revitalisasi BUMD dengan difokuskan pada sektor produk					





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1
	2019	2020	2021	2022	2023
	unggulan				
Peningkatan promosi Destinasi Pariwisata Daerah			√	√	√
Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah	√	√	√		
Peningkatan intensitas promosi pariwisata, baik melalui kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, swasta ataupun secara Mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi		√	√	√	√
Peningkatan ketersediaan kualitas tenaga pendidikan PAUD yang merata di seluruh distrik	√	√	√	√	√
Peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah	√	√	√	√	√
Peningkatan penilaian / akreditasi penyelenggara pendidikan	√	√	√	√	√
Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program keselarasan disiplin ilmu	√	√	√	√	√
Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan, kualitas dan kepastian pendidikan	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema	Tema	Tema	Tema	Tema
	/	/	/	/	/
	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1
	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan daya saing daerah melalui pendidikan yang terpusat di Biak Numfor	√	√	√	√	√
Peningkatan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca	√	√	√	√	√
Optimalisasi pembinaan upaya kesehatan masyarakat dan bina gizi ibu dan anak	√	√	√	√	√
Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan serta pemenuhan imunisasi bayi dan balita yang intensif	√	√	√	√	√
Optimalisasi cakupan pelayanan terhadap kesehatan lansia	√	√	√	√	√
Pemantauan terhadap distribusi obat dan makanan yang intensif	√	√	√	√	√
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pengendalian faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan surveilans	√	√	√	√	√
Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana	√	√	√	√	√
Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1
	2019	2020	2021	2022	2023
Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)					
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	√	√	√	√	√
Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu	√	√	√	√	√
Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, dan perkembangan ilmu kesehatan	√	√	√	√	√
Peningkatan sertifikasi tenaga kesehatan	√	√	√	√	√
Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan	√	√	√	√	√
Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan	√	√	√	√	√
Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan	√	√	√	√	√
Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif	√	√	√	√	√
Pemenuhan sarana prasarana	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema	Tema	Tema	Tema	Tema
	/	/	/	/	/
	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1
	2019	2020	2021	2022	2023
sanitasi untuk menuju terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat					
Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan untuk memperkuat sinergitas dengan arah kebijakan pembangunan	√	√	√	√	√
Peningkatan sistem pembinaan atlet melalui cabang-cabang olahraga dan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai	√	√	√	√	√
Optimalisasi pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
Peningkatan kesejahteraan bagi anak panti asuhan/panti jompo	√	√	√	√	√
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	√	√	√	√	√
Peningkatan ketrampilan pencari kerja	√	√	√	√	√
Perluasan kesempatan kerja	√	√	√	√	√
Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama	√	√	√	√	√
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kerukunan hidup bermasyarakat	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema	Tema	Tema	Tema	Tema
	/	/	/	/	/
	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1	Fokus 1
	2019	2020	2021	2022	2023
Pembinaan masyarakat dan organisasi tertentu dalam event bela Negara, pembauran kebangsaan dan wawasan kebangsaan	√	√	√	√	√
Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas penampilan kelompok- kelompok budaya lokal	√	√	√	√	√
Optimalisasi sistem penilaian pemberian penghargaan ASN dalam mendorong profesionalisme ASN, serta pemberlakuan sanksi dalam mendorong produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan fasilitasi dan pembinaan aparatur yang produktif dan profesional	√	√	√	√	√
Optimalisasi peran Distrik dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi	√	√	√	√	√
Respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	√	√	√
Harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1	Tema / Fokus 1
	2019	2020	2021	2022	2023
	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda	√	√	√	√
Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam semua bidang	√	√	√	√	√
Peningkatan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD	√	√	√	√	√
Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Rangka Pembinaan Infentarisasi dan Penyusunan Data Partisipasi tertib Arsip	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas pengelolaan aspirasi dan isu-isu publik serta pengelolaan data dan informasi kebijakan publik untuk layanan informasi	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas tata kelola, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan pengelolaan sumber daya informatika, pos dan telekomunikasi.	√	√	√	√	√
Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema	Tema	Tema	Tema	Tema
	/	/	/	/	/
	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus
	1	1	1	1	1
	2019	2020	2021	2022	2023
di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor					
Pendokumentasian perencanaan pembangunan secara sistematis dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up secara terpadu	√	√	√	√	√
Peningkatan standar kompetensi dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	√	√	√	√	√
Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi	√	√	√	√	√
Penyediaan data dan informasi yang valid dan akuntabel untuk mendukung perencanaan	√	√	√	√	√
Peningkatan kesempatan berkarir bagi perempuan di berbagai bidang pekerjaan					
Peningkatan kesempatan untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	√	√	√	√	√
Optimalisasi kampung ramah anak	√	√	√	√	√
Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Jaringan jalan dan jembatan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema	Tema	Tema	Tema	Tema
	/	/	/	/	/
	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus
1	1	1	1	1	
2019	2020	2021	2022	2023	
khusus					
Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan rob serta mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase	√	√	√		
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara yang memadai	√	√	√	√	√
Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai			√	√	√
Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan	√	√	√	√	√
Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang	√	√	√	√	√
Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap		√	√	√	√
Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan	√	√	√	√	√
Peningkatan sarana prasarana	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema	Tema	Tema	Tema	Tema
	/	/	/	/	/
	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus
	1	1	1	1	1
	2019	2020	2021	2022	2023
perumahan dan kawasan permukiman					
Penyediaan jaringan irigasi secara memadai bagi terpenuhinya kebutuhan pengairan					
Optimalisasi pengelolaan, peningkatan layanan, dan akses masyarakat terhadap air minum	√	√	√	√	√
Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota					
Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah serta Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media					
Optimalisasi pengolahan sampah perkotaan secara ramah lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi	√	√	√	√	√
Peningkatan ruang terbuka hijau melalui revitalisasi serta penambahan Taman kota dan taman di lingkungan RT/RW				√	√
Pemantauan dan penegakan aturan	√	√	√	√	√





Strategi	Arah Kebijakan				
	Tema	Tema	Tema	Tema	Tema
	/	/	/	/	/
	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus	Fokus
	1	1	1	1	1
	2019	2020	2021	2022	2023
tentang pengendalian pencemaran air dan udara					
Peningkatan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, dan optimalisasi rehabilitasi paska bencana	√	√	√	√	√
Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi	√	√	√	√	√
Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat					





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023) meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab untuk diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor tahun 2019- 2023. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Selain program utama, dalam Renstra ini juga dicantumkan program pendukung yang ada di semua bagian, yaitu

- a. Prioritas 1 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- b. Prioritas 2: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Prioritas 3 : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- d. Prioritas 4 : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- e. Prioritas 3 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- f. Prioritas 4 : Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
- g. Prioritas 5 : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- h. Prioritas 6 : Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- i. Prioritas 8 : Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- j. Prioritas 11 : Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
- l. Prioritas 12 : Program Pengembangan Bina Konstruksi

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan





prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang.

Berdasarkan prioritas program Kabupaten Biak Numfor dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Dari daftar program dalam Permendagri tersebut terpilih untuk tahun 2019-2023 pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Biak Numfor .

6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (Tahun 2019 – 2023) program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2019 – 2023 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD / DAU, APBD Propinsi Papua dan APBN. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak lintas SKPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor (Tabel 5.1)



Pemerintah
Kabupaten
Biak Numfor





Tabel 6.1

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Tujuan	Saran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	%		77	655.737.800	77	694.311.580	77	736.742.738	77	783.417.012	77	834.758.713	365	3.704.967.843	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		x.xx.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Rekening		12	42.000.000,00	12	46.200.000	12	50.820.000	12	55.902.000	12	61.492.200	60	256.414.200	
		x.xx.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12	4.200.000,00	12	4.620.000	12	5.082.000	12	5.590.200	12	6.149.220	60	25.641.420	
		x.xx.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	umlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan	Unit		12	50.000.000,00	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	60	305.255.000	
		x.xx.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	Paket		12	25.000.000,00	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	12	36.602.500	60	152.627.500	
		x.xx.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan pengadaan yang terpenuhi	Paket		12	10.000.000,00	12	11.000.000	12	12.100.000	12	13.310.000	12	14.641.000	60	61.051.000	



Tujuan	Saran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		#N/A	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti			12	254.537.800,00	12	279.991.580	12	307.990.738	12	338.789.812	12	372.668.793	60	1.553.978.723	
		#N/A	Penyediaan Jasa Tenaga Harian				5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	1.350.000.000	
		x xx 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		68	16.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	68	16.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Unit		5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	25	25.000.000.000	
x.xx.2.3			Pembangunan gedung kantor				5	16.000.000.000	5	16.000.000.000	5	16.000.000.000	5	16.000.000.000	5	16.000.000.000	68	80.000.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara	JENIS		6	10.900.000	6	10.900.000	6	10.900.000	6	10.900.000	6	10.900.000			
		x xx 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	65.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
x.xx.3.2			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya												100	65.000.000	100	65.000.000	
		x xx 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Dokumen		12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	12	26.620.000	12	29.282.000	60	122.102.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dokumen		12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	12	26.620.000	12	29.282.000	60	122.102.000	
			Program																





Tujuan	Saran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
			Pelatihan Non Formal dan Fornal Bagi aparaturn Sipil Negara	Presentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparaturn			30	50.000.000	40	80.000.000	50	110.000.000	40	83.000.000	40	85.000.000		408.000.000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur		1.3.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		m			101.100.000.00		111.210.000.000		122.331.000.000		132.567.600.000		145.824.360.000		613.032.960.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan terbangun	km	15.410	54,00	23.650.000.000,00	77,00	24.359.000.000	100,00	25.093.000.000	123,00	25.845.000.000	146,00	26.622.000.000	146,00	125.569.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Panjang jembatan terbangun	m	70	205,00	5.800.000.000	245,00	6.380.000.000	285,00	7.018.000.000	325,00	7.719.800.000	365,00	8.491.780.000	365,00	35.409.580.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAKMeningkatnya kualitas infrastruktur	Panjang jalan yang ditingkatkan	km	2.350	1.552,00	1.500.000.000,00	1.597,00	1.650.000.000	1.642,00	1.815.000.000	1.687,00		1.732,00		1.732,00	4.965.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.15.3			Pembangunan jalan	Terbangunnya jalan ring road, jalan dua jalur dan jalan bagi masyarakat	m		20.778	93.800.000.000,00	26.571	103.180.000.000	30.689	113.498.000.000	31.882	124.847.800.000	36.000	137.332.580.000	145.920	572.658.380.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.3.15.5	Pembangunan jembatan	Terbangunnya Jembatan	m		58	5.800.000.000	97	6.380.000.000	136	7.018.000.000	175	7.719.800.000	195	8.491.780.000	661	35.409.580.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN





Tujuan	Saran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																			PENATAAN RUANG
		1316	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					6.440.000.000		6.510.000.000		6.587.000.000		6.671.700.000		6.764.870.000		32.973.570.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase /gorong-gorong	m	2.300,00	2.840,00	2.000.000,00	3.380,00	2.060.000.000	3.920,00	2.122.000.000	4.460,00	2.186.000.000	5.000,00	2.251.000.000	5.000,00	10.619.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Panjang Rehabilitasi Pembangunan Pedestrian	m	2.300,00	2.840,00		3.380,00		3.000		4.000		5.000		15.000	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Panjang Saluran drainase/gorong-gorong yang di bangun	m	1.500,00	1.800,00	640.000.000	2.100,00	640.000.000	710	640.000.000	710	640.000.000	710	640.000.000	3.550	3.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Panjang Pembangunan Pedestrian	m	1.500,00	1.800,00	4.750.000.000	2.100,00	4.750.000.000	1.850	4.750.000.000	1.850	4.750.000.000	1.850	4.750.000.000	9.250	23.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Jumlah resapan air yang dibangun	unit	136,00	176,00	350.000.000	216,00	350.000.000	800	350.000.000	800	350.000.000	800	350.000.000	4.000	1.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.16.3			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya drainase/gorong-gorong	m		710	640.000.000	710	640.000.000	710	640.000.000	710	640.000.000	710	640.000.000	3.550	3.200.000.000	
		#N/A	Pembangunan Pedestrian/trotoar	Terbangunnya pedestrian/trotoar bagi pejalan kaki	m		1.850,00	4.750.000.000	1.850,00	4.750.000.000	1.850,00	4.750.000.000	1.850,00	4.750.000.000	1.850,00	4.750.000.000	9.250	23.750.000.000	





Tujuan	Saran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		#N/A	Pembangunan Resapan air		unit		3	180.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	15	900.000.000	
			Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Terpeliharanya drainase	m		800	350.000.000	800	350.000.000	800	350.000.000	800	350.000.000	800	350.000.000	4.000	1.750.000.000	
		1 3 17	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Panjang Turap/taludbrongjong yang dibangun	m ³		1.800,00	2.500.000.000	2.600,00	2.575.000.000	3.400,00	2.653.000.000	4.200,00	2.732.000.000	5.000,00	2.814.000.000	5.000,00	13.274.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.3.17.3	Pembangunan turap/talud/brongjong	Terbangunnya turap/talud/brongjong	m ³		1.800,00	2.500.000.000	2.600,00	2.575.000.000	3.400,00	2.653.000.000	4.200,00	2.732.000.000	5.000,00	2.814.000.000	5.000,00	13.274.000.000	
Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan irigasi yang sesuai standar	1 3 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik	Km	399,00	427,40	1.876.248.000,00	427,40	1.876.248.000,00	427,40	1.876.248.000,00	427,40	1.876.248.000,00	427,40	1.876.248.000,00	2.137,00	9.381.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.3.18.3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	518,00	427,40	1.876.248.000,00	427,40	1.876.248.000,00	427,40	1.876.248.000,00	427,40	1.876.248.000,00	427,40	1.876.248.000,00	2.137	9.381.240.000	
		1 3 21	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Jumlah Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana (lokasi)		N/A									3		3		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1 3 25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Jumlah RT yang memiliki sumur bor	unit	-	-	1.500.000.000,00	1.545.000.000,00		1.592.000.000,00		1.639.000.000,00		1.689.000.000,00		7.965.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	





Tujuan	Saran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.3.25.4	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Terbangunnya sumur bor bagi masyarakat	unit		6	3.711.449.655	6	3.711.449.655	6	3.711.449.655	6	3.711.449.655	6	3.711.449.655	30	18.557.248.275	
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	1 3 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					6.732.463.000		8.202.682.167		8.202.682.167		8.202.682.167		8.202.682.167	-	39.543.191.667	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Cakupan RT yang berakses air bersih (PAH)	unit	200,00	360,00	1.500.000,00	520,00	1.545.000.000	680,00	1.592.000.000	840,00	1.639.000.000	1.000,00	1.689.000.000	1.000,00	7.965.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Fasilitas pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah Sanitasi	unit	6	12,00	1.764.263.000,00	22,00	3.234.482.166,67	22,00	3.234.482.166,67	22,00	3.234.482.166,67	22,00	3.234.482.166,67	100	14.702.191.667	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Cakupan keterlayakan Air Bersih	SR	400,00	720,00	2.500.000,00	1.040,00	2.575.000.000	1.360,00	2.653.000.000	1.680,00	2.732.000.000	2.000,00	2.814.000.000	2.000,00	13.274.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.3.27.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat	m		9.000,00	4.968.200.000,00	9.000,00	4.968.200.000,00	9.000,00	4.968.200.000,00	9.000,00	4.968.200.000,00	9.000,00	4.968.200.000,00	45.000	24.841.000.000	
		1.3.27.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terbangunnya MCK Plus bagi masyarakat	unit		12,00	1.764.263.000,00	22,00	3.234.482.166,67	22,00	3.234.482.166,67	22,00	3.234.482.166,67	22,00	3.234.482.166,67	100	14.702.191.667	
				Jumlah Pengguna Energi Baru dan Terbarukan	Unit	N/A													DINAS PEKERJAAN





Tujuan	Saran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																			UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Panjang jalan desa yang dibangun	Km	-	0,80	700.000.000,00	1,00	875.000.000,00	1,00	875.000.000,00	1,00	875.000.000,00	1,00	875.000.000,00	4,80	4.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.3.30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terbangunnya jalan desa	Km		0,80	700.000.000,00	1	875.000.000	1	875.000.000	1	875.000.000	1	875.000.000	5	4.200.000.000	
		1 3 31	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan					28.785.543.000		31.664.097.300		34.830.507.030		38.313.557.733		42.144.913.506		175.738.618.569	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	KM	7,72	24,55	28.785.543.000	27	31.664.097.300	27	34.830.507.030	27	38.313.557.733	27	42.144.913.506	133	175.738.618.569	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Jumlah jembatan yang ditingkatkan															DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Peningkatan Jalan	Adanya peningkatan jalan	Km		24,55	28.785.543.000	27,00	31.664.097.300	27,00	34.830.507.030	27,00	38.313.557.733	27,00	42.144.913.506	133	175.738.618.569	
			Tata Ruang																
Meningkatkan kualitas penataan	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	1 2 21	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang ditetapkan	Dokumen	10,00	12,00	500.000.000,00	14,00	515.000.000	16,00	531.000.000	18,00	546.000.000	20,00	563.000.000	20,00	2.655.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





Tujuan	Saran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcom) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah dokumen RTBL yang tersusun															
		1 4 21	Program Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat tentang Pemanfaatan ruang	distrik	5,00	6,00	450.000.000,00	7,00	463.000.000,00	8,00	477.000.000,00	9,00	492.000.000,00	10,00	507.000.000,00	10,00	2.389.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.4.15.7	Survey dan Pemetaan Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	Unit		88	12.481.075.200	100	14.183.040.000,00	100	14.183.040.000,00	100	14.183.040.000,00	100	14.183.040.000,00	488	69.213.235.200	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang	persen	80,00	83,00	250.000.000,00	86,00	257.000.000,00	89,00	265.000.000,00	92,00	273.000.000,00	95,00	281.000.000,00	95,00	1.326.000.000,00	
			Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor	persen	1.000,00	1.200,00		1.400,00		1.600,00		1.800,00		2.000,00				
			Program BINA KONstruksi																
			Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Meningkatkan Produk Pengaturan Bina Konstruksi				50.000.000		537.000.000,00		598.000.000,00		660.500.000,00		702.500.000,00			





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk dapat melihat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor tahun 2017-2018

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. dapat dilihat dalam Tabel T.c.28.





Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capain Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	Panjang jalan yang terbangun dan fungsional	31	54	77	100	123	146	146
	Panjang jembatan terbangun dan fungsional	165	205	245	285	325	365	365
	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.507	1552	1597	1642	1687	1732	1732
	Panjang jalan dalam kondisi baik	518	104140	207761	311383	415004	518626	518626
	Panjang jembatan dalam kondisi baik	399	429	459	489	519	549	549
	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase/gorong-gorong	2.300	2840	3380	3920	4460	5000	5000
	Panjang Rehabilitasi Pembangunan Pedestrian	2.300	2840	3380	3920	4460	5000	5000
	Panjang Saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	1.500	1800	2100	2400	2700	3000	3000
	Panjang Pembangunan Pedestrian	1.500	1800	2100	2400	2700	3000	3000
	Jumlah resapan air yang dibangun	136	176	216	256	296	336	336
	Panjang Turap/talud/brojong yang dibangun	1.000	1800	2600	3400	4200	5000	5000
	Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	10	12	14	16	18	20	20
	Terwujudnya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat tentang Pemanfaatan ruang	5	6	7	8	9	10	10
	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	-	60	65	70	75	80	80
	Cakupan Pengendalian Ijin Lokasi	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	95,00



Jumlah Kepemilikan IMB	1.000	1200	1400	1600	1800	2000	2000
Cakupan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang terbangun	10,00	18,00	26,00	34,00	42,00	50,00	50,00
Cakupan keterlayanan air baku	-	30,00	32,00	35,00	40,00	45,00	45,00
Cakupan keterlayanan air bersih	400	720	1040	1360	1680	2000	2000
Cakupan RT yang berakses air bersih (PAH)	200	360	520	680	840	1000	1000
Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang		80	85	90	95	100	100
Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		30	50	70	100	100	100





BAB VIII P E N U T U P

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Biak Periode Tahun 2019-2024, yaitu: **“*BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN*”**, dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor

Biak,.....Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIAK NUMFOR



ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670905 199712 1 001